

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang Implementasi Kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal) Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) dalam Mengurangi Angka Natalitas dan Mortalitas Pada Ibu dan Anak Di Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Yang diukur berdasarkan aspek Komunikasi, Sumberdaya dan Struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa belum terlaksana dengan tepat. Adapun kesimpulan pada indikator sebagai berikut:

##### **Aspek Komunikasi**

##### **➤ Kegiatan kampanye, penyuluhan dan penyadartahuan jaminan persalinan (Jampersal)**

Dari proses komunikasi di Puskesmas Hadakewa telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi persalinan, penyuluhan ke masyarakat adanya kegiatan kelas ibu hamil untuk program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi.

## **Aspek Sumberdaya**

- **Dukung tenaga kesehatan (medis) dan fasilitas Jaminan Persalinan (Jampersal)**

Dari proses Sumberdaya yaitu, telah ditempatkan Bidan di 17 desa yang berada di Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Dari segi sarana dan prasarana, puskesmas Hadakewa terkendala belum adanya rumah tunggu untuk persalinan. Pendanaan yang tersedia untuk peningkatan program persalinan di Puskesmas Hadakewa saat ini adalah dana jampersal, sedangkan bagi masyarakat yang tidak ada kartu jampersal menggunakan dana pribadi dalam proses persalinan.

## **Struktur birokras**

- **Ketersediaan standar operasional atau petunjuk teknis implementasi Kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal)**

Dari proses birokrasi yakni dalam melakukan tindakan program persalinan, tim Puskesmas telah memakai acuan berupa SOP yang mana didalam SOP telah tertuang 28 langkah asuhan persalinan normal yang harus diikuti dalam proses persalinan. Sistem petunjuk penanggung jawab program pun telah tertuang di surat tugas, dan sistem koordinasi berjenjang dalam segala permasalahan pun telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang Implementasi Kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal) Oleh Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Dalam Mengurangi Angka Natalitas Dan Mortalitas Pada Ibu Dan Anak Di Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata. Maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Untuk puskesmas Hadakewa, kecamatan Lebatukan agar lebih giat dalam mensosialisasikan kembali program jaminan persalinan. Karena tiap tahun pasti bertambah ibu yang melahirkan yang kurang pengetahuannya tentang program jaminan persalinan. Agar mereka tidak buta dengan informasi dan mereka dapat mempersiapkan segala syarat dan proses pendaftaran program jaminan persalinan.
2. Kepada Tim Pengelola jaminan persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata. Hendaknya seluruh pengelola jampersal mampu memahami isi junkis terkait program jampersal, selalu berkoordinasi serta melakukan komunikasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten serta Puskesmas agar pelaksanaan program jampersal tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga penyerapan dana dapat di realisasikan.
3. Kepada pengguna jampersal (Masyarakat), diharapkan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan pelayanan program jaminan persalinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat akan terbantu dalam jaminan pembiayaan kesehatan mulai dari hamil sampai paska persalinan dan pelayanan KB.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin Tahir, 2014. *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan Daerah*, Band, ALFABETA.
- Suharsimin, 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Jakarta : Rineka Cipta.
- Depkes RI. 2013. *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: *Badan Penelitian dan pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI*.
- Edwards III (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hadari Nawawi, 1987, *Administrasi Pendidikan*, Haji Masagung.
- Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- HermanaDody, 2019. *Kebijakan publik*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Polic* .Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Tachjan.(2006).*Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press
- Widodo Jokowi. (2001).*Good Governance*, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: CV Cutra Media.
- William N Dunn. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

### Jurnal

- Gurendro Putro (2013) tentang *Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Persalinan Dalam Meningkatkan Cakupan Persalinan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Situbondo Tahun 2013*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Volume 2 Nomor 3. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Jogjakarta.
- Nurhalina Sari (2017). *Determinan Fertilitas melalui Pendekatan Total Fertility Rate (TFR) di Indonesia: Analisis Data Survei Demografi Kesehatan*

Indonesia (SDKI) Tahun 2007. Jurnal Dunia Kesmas Volume 6 Nomor 2. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati. Lampung.

Rukmini, (2013). *Analisis Implementasi Kebijakan Jampersal Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang*. Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Volume 16 Nomor 2. Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Jl. Indrapura 17 Surabaya.

Richard Djiko (2018). *Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Halmahera Utara*. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Volume 3 Nomor 2. Universitas Merdeka Malang.

Stephen Tatuhe (2016). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Suatu Studi di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Talaud)*. Jurnal Administrasi Publik Volume 1 Nomor 1. Universitas Samratulangi. Manado.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Lembata.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kependudukan.

### **Internet**

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/mediakom/20110518/311069/mengupas-kebijakan-jaminan-persalinan/.diakses> tanggal 12 Oktober 2021 Pukul 20.52 Wita Departemen Kesehatan RI 2013, *Buku Saku Jaminan Persalinan*, diakses dari <http://depkes.go.id> tanggal 12 Oktober 2021 Pukul 20.59 Wita